

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Bebas Basis Infrastruktur Sebuah Kajian Pustaka Terstruktur (*Systematic Literature Review*)

Habib Aqsal Pirnanda¹, Salahudin²

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Malang,
habibaqsalp@gmail.com

²Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Malang,
salahudinmsi@umm.ac.id

Abstrak, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat partisipasi masyarakat serta aspek yang terkait dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik purposive sampling dan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan penyampaian kuesioner. Hasil penelitian ditinjau dari 5 indikator diantaranya; 1. Partisipasi masyarakat dalam memberikan kontribusi dalam hal ini partisipasi masyarakat rendah apalagi dengan adanya rapat sangat minim, 2. Partisipasi masyarakat dalam proses membangun kesadaran bersama dalam hal ini sosialisasi kurang dilakukan oleh pemerintah sehingga masyarakat minim terlibat dalam pembangunan, 3. Partisipasi masyarakat dengan keterlibatan secara sukarela sangat tinggi baik tenaga maupun uang, 4. Partisipasi masyarakat dengan suatu proses yang aktif dalam hal ini masyarakat kurang aktif dalam partisipasi maupun pembangunan dan terkesan menunggu komando, 5. Partisipasi masyarakat dengan melakukan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf dalam hal ini kurang adanya dialog antara masyarakat dan pemerintah.

Kata Kunci: *Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Infrastruktur, Penyelenggaraan Infrastruktur*

Abstract, This study aims to determine and analyze the level of community participation and aspects related to the level of community participation in the implementation of infrastructure development. The approach used in this research is a qualitative approach with a purposive sampling technique and data collection is done through interviews and questionnaires. The results of the study were reviewed from 5 indicators including; 1. Community participation in contributing, in this case, community participation is low, especially with very minimal meetings, 2. Community participation in the process of building mutual awareness in this case, socialization is not carried out by the government so that the community is minimally involved in development, 3. Community participation with community involvement very high voluntarily both in terms of energy and money, 4. Community participation with an active process in this case the community is less active in participation and development and seems to be waiting for orders, 5. Community participation by conducting dialogue between local communities and staff, in this case, is lacking a dialogue between the community and the government.

Keywords: *Community Participation, Infrastructure Development, Infrastructure Implementation*

Pendahuluan

Realisasi pembangunan telah menyentuh dan dinikmati oleh hampir seluruh masyarakat, namun tidak berarti terjadi secara demokratis. Dengan kata lain, hasil-hasil pembangunan tersebut belum mampu menjangkau pemerataan kehidupan seluruh masyarakat. Masih banyak terjadi ketimpangan atau kesenjangan pembangunan maupun hasil- hasilnya, baik antara pusat dan daerah atau dalam lingkup yang luas adalah kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan yang terlihat dari berbagai bidang, khususnya pada sektor ekonomi. Salah satu kesenjangan di sektor ekonomi tersebut diantaranya adalah tidak meratanya kekuatan ekonomi di setiap wilayah, seperti tidak meratanya tingkat pendapatan (perkapita) penduduk, tingkat kemiskinan dan kemakmuran, mekanisme pasar dan lain-lain. Dampak dari kesenjangan tersebut telah menimbulkan beberapa gejala dalam bentuk tuntutan adanya pemerataan pembangunan maupun hasil-hasilnya, dari dan untuk setiap wilayah. Untuk mengurangi bahkan menghilangkan kesenjangan tersebut pemerintah telah menempuh beberapa kebijaksanaan pembangunan diantaranya dengan mem- berlakukan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah yang pada prinsipnya merupakan pelimpahan we- wenang pusat ke daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Namun Sampai saat ini pembangunan masih berkonsentrasi di daerah pusat khususnya di Ibukota dan sekitarnya, keadaan seperti ini sangatlah jauh dari apa yang dicita- citakan dalam tujuan nasional Indonesia mengenai usaha-usaha untuk pemerataan pembangunan. Salah satu contoh ketidakmerataan pembangunan Indonesia dengan pembangunan masih berpusat di pulau Jawa, dimana banyak terdapat fasilitas yang memadai seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan sedangkan pulau kecil tidak mengalami pemerataan pembangunan, sehingga segala kebutuhan hidup penduduk sulit untuk didapatkan, seperti pelayanan kesehatan ataupun sarana pendidikan seperti daerah-daerah di Indonesia yang masih terpencil. Mereka harus bersusah payah untuk mendapatkan fasilitas seperti layanan kesehatan, pendidikan atau fasilitas-fasilitas lainnya mengingat jum- lahnya yang sangat minim dan tempatnya yang jauh dari pemukiman penduduk. Ketimpangan pengelolaan merupakan wujud paling nyata dari kelemahan internal kekuasaan yang diharapkan mampu melaksanakan agenda pembangunan nasional bahkan pembangunan di daerah.

Kebijakan pemerintah harus dibuat pro-rakyat supaya hal dalam kemajuan pembangunan infrastuktur seperti pendidikan dan kesehatan agar dapat lebih dirasakan langsung oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat telah berada dalam posisi yang semakin penting. Ini terjadi sebagai konsekuensi logis dari terbukanya kran kebebasan berekspresi masyarakat akibat proses reformasi yang terjadi tahun 1998 di Indonesia. Dampaknya, masyarakat menjadi lebih kritis dan terbuka mengkaji serta mengkritisi kebijakan-kebijakan yang akan dan sedang dilakukan pemerintah. Dari kondisi tersebut, bermunculanlah lembaga- lembaga yang tumbuh di tengah masyarakat yang bukan saja sebagai wujud

kepedulian terhadap nasib mereka sendiri. Ternyata lembaga-lembaga atau organisasi itu ada pula yang tumbuh menjadi alat-alat atau sarana-sarana bagi mediasi kepentingan masyarakat, termasuk pula kepada pemerintah. Terkait dengan hal itulah, adalah hal yang wajar saat ini jikalau pemerintah sendiri melihat hal ini dengan bijak serta berbaik sangka. Pemerintah harus pula siap menjadi lebih terbuka, akuntabilitas serta lebih transparan menghadapi iklim yang terjadi di masyarakat saat ini. Berbagai rencana pembangunan yang dimiliki pemerintah semestinya sudah mulai mengajak partisipasi masyarakat. Karena tanpa didukung peran serta masyarakat, pembangunan yang dilaksanakan akan menjadi kurang efektif. Perlu adanya masyarakat untuk melihat pemeliharaan infrastruktur sanitasi lingkungan yang tersedia di ranahnya sehingga dapat menjamin keberlanjutannya. Masyarakat juga harus merancang sarana atau strategi untuk memastikan bahwa anggota rumah tangga dimasukkan ke dalam program mereka dan termotivasi untuk menyumbangkan kuota mereka terhadap penyediaan dan pengiriman infrastruktur sanitasi lingkungan (Olugbamila O.B, 2020).

Dari tahun ke tahun, proses pembangunan yang dilakukan pemerintah ternyata juga semakin dikritisi oleh masyarakat. Dan dampaknya, tumbuh bias-bias negatif dari masyarakat terhadap proses pembangunan yang sedang atau akan dilakukan. Sekurangnya, ternyata masyarakat ada yang tidak peduli dengan proses pembangunan yang sedang dan akan dilakukan. Ini jelas menunjukkan adanya sebuah gejala kurangnya partisipasi masyarakat terhadap agenda pembangunan. Kasus ini misalnya muncul dalam beberapa peristiwa penolakan masyarakat terhadap beberapa proyek pembangunan yang akan dilakukan pemerintah. Salah satu indikasi yang mungkin timbul bisa jadi karena berangkat dari adanya ketidakberdayaan masyarakat untuk menghadapi masalah internal mereka.

Infrastruktur mengacu pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, irigasi, drainase, bangunan, dan fasilitas umum lainnya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat manusia dan bidang ekonomi. Sistem infrastruktur merupakan penopang utama fungsi sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Pada dasarnya, penyediaan infrastruktur dilakukan oleh semua orang, begitu juga dengan kebutuhan dasar lainnya seperti sandang dan pangan.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan nasional, merupakan prasyarat utama yang akan melandasi keberhasilan dalam proses pembangunan Indonesia. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak hanya dipandang sebagai bagian dari proses tetapi juga merupakan bagian tujuan, dimana partisipasi merupakan salah satu indikator tingkat keberhasilan khususnya program pembangunan desa. Oleh karena itu partisipasi dapat berfungsi ganda, yaitu sebagai alat untuk menyelenggarakan pembangunan dan sebagai tujuan pembangunan itu sendiri.

Sesuai ketentuan Pasal 354 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah

dalam membentuk Peraturan Daerah mengenai tata cara Partisipasi Masyarakat. Pengaturan Partisipasi Masyarakat dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan Peraturan Daerah dan kebijakan daerah, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengevaluasian pembangunan daerah, pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam daerah, dan penyelenggaraan pelayanan publik serta akses Masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

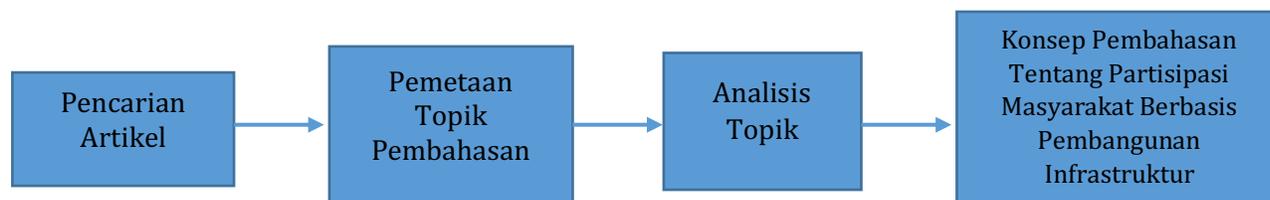
Bentuk partisipasi masyarakat merujuk pada wujud kontribusi masyarakat dalam keikutsertaannya. Wujud kontribusi dari partisipasi masyarakat sudah barang tentu tergantung pada tahapan proses pelaksanaan program, karena wujud kontribusi tersebut akan berbeda pada setiap tahapan. Misalkan dalam tahapan partisipasi pada pengambilan keputusan, maka wujud kontribusi dari partisipasi masyarakat berupa sumbangan pemikiran dimana yang menjadi tolak ukurnya adalah banyaknya usul dan saran atau bahkan penolakan. Hal yang sama dikatakan oleh Cohen dan Uphoff (1979) bahwa wujud dari partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan itu bisa bermacam - macam seperti: kehadiran dalam rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Melihat dari tahapan pelaksanaan pembangunan, dimana partisipasi terbagi atas partisipasi langsung dan tidak langsung. partisipasi secara langsung berarti anggota masyarakat tersebut ikut memberikan bantuan tenaga dalam kegiatan yang dilaksanakan, misalnya dalam proyek pembangunan jalan, anggota masyarakat ikut serta dalam pekerjaan membangun jalan tersebut. Sedang partisipasi secara tidak langsung berupa bantuan dana dan material yang diperlukan.

Dari uraian pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk partisipasi yang merupakan wujud kontribusi masyarakat untuk ikut terlibat dalam kegiatan pembangunan desa sangat variatif. Untuk alasan penyederhanaan sebagai indikator besaran partisipasi masyarakat dapat diklasifikasikannya berdasarkan wujud konkrit yaitu kontribusi berbentuk natura dan berbentuk innatura. Bahwa bentuk partisipasi masyarakat yang berwujud natura lebih mudah terukur secara kuantitas karena dampaknya dapat dirasakan secara langsung. Seta sebaliknya, bentuk partisipasi masyarakat yang berwujud innatura perlu pemahaman yang lebih mendalam untuk dapat mengukurnya secara kualitas.

Metode Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji sebuah artikel yang memiliki keterkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur. Sumber data yang didapat ialah berupa kumpulan artikel-artikel yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah yang bereputasi internasional. Adapun kajian ini didasarkan pada beberapa pertanyaan antara lain, yaitu: 1). Apa tema yang dominan dalam pembahasan tentang perencanaan pembangunan pedesaan berbasis Lingkungan? 2). Bagaimana hubungan antara

perencanaan pembangunan dan pengelolaan lingkungan? 3). Apa saja topik yang berhubungan dengan penelitian tentang perencanaan pembangunan pedesaan berbasis lingkungan? 4). Bagaimana jenis pemetaan yang digunakan dalam membahas tentang perencanaan pembangunan pedesaan berbasis lingkungan? 5). Konsep apa yang digunakan dalam studi tentang perencanaan pembangunan pedesaan berbasis lingkungan. Beberapa pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijadikan sebagai acuan kajian yang didasarkan pada penemuan artikel pada database SCOPUS. Artikel yang nanti direview didasarkan pada dua tahapan yaitu diantaranya: 1) Pencarian artikel dan 2) Pemetaan topik.



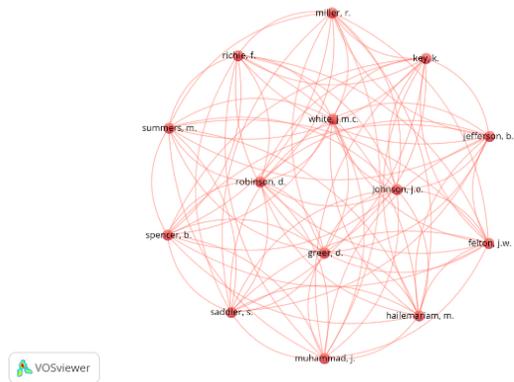
Gambar 1. Proses Review Artikel

Adapun pencarian dan pemetaan artikel yang berkaitan dengan topik pembahasan diperoleh melalui cara berikut. Pertama, artikel dilakukan identifikasi awal. Hal ini bertujuan untuk mencari data di database scopus dengan memasukkan kata kunci “Perencanaan

Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan” selanjutnya pada kolom pencarian di isikan dengan pembatasan tahun 2020 hingga tahun 2021 agar hasil pencarian jurnal benar-benar yang paling baru. Pencarian tersebut mendapatkan jurnal sebanyak 759 artikel yang memiliki relevansi dengan topik yang diangkat yaitu perencanaan pembangunan ifrastruktur yang berkelanjutan. Tahapan kedua adalah melakukan verifikasi artikel yang sudah dikumpulkan tersebut. Pada tahap verifikasi ini menghasilkan 77 artikel yang dianggap sudah sesuai dan relevan dengan topik yang diangkat, lalu dari angka tersebut akan dilakukan proses verifikasi lagi agar jurnal yang terselksi benar – benar memiliki hubungan dengan topik utama, setelah dilakukan verifikasi kedua maka di dapatkan 120 artikel yang benar- benar memiliki relevansi dengan apa yang akan dibahas dalam topik pembahasan ini

Hasil dan Pembahasan

Untuk dapat melihat keterkaitan dan pengelompokkan tema dapat dilihat pada hasil analisis proses verifikasi yang diperoleh berdasarkan 77 artikel. Melalui media aplikasi Vosviewrs dapat memetakan topik berdasarkan pada pengklasifikasian tabel. Pada gambar 1 dapat digambarkan topik - topik yang terkait dengan kajian mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur yang nantinya kan di kelompokkan pada kluster – kluster sesuai dengan fokus topik pembahasan. Adapun warna warna yang ada pada gambar menunjukkan pengelompokkan berdasarkan topik yang ada. Tujuan dari pengelompokkan ini adalah untuk mempermudah dalam melakukan analisis mengenai topik – topik yang akan dijadikan sebagai bahan rujukan.

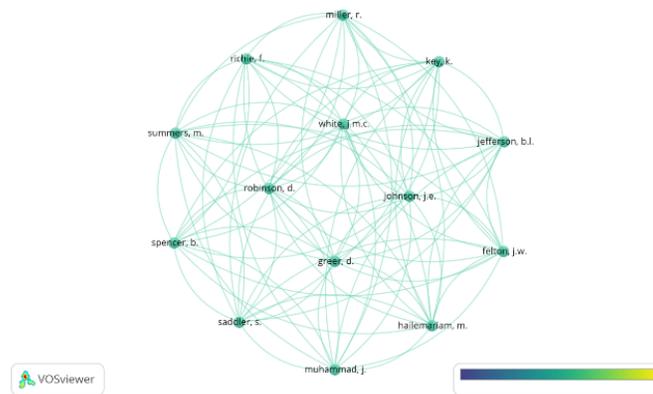


Gambar 5. Network Visualization

Mengacu pada beberapa penulis diatas yang memiliki hubungan dengan rencana pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan maka bisa di katakana bahwa sebagian besar penulis menulis mengenai ekologi yang merupakan hubungan makhluk hidup dengan lingkungan, tentu ini termasuk pada bagian perencanaan, karena perencanaan pengembangan infrastruktur akan sangat melibatkan hubungan masyarakat dengan lingkungannya dan juga beberapa penulis ada yang berfokus pada transportasi. Adekola dan P O Iyalomhe membahas mengenai tingkat kesadaran masyarakat yang rendah dalam hal pembuangan limbah, sehingga Tindakan tersebut mendorong langkah-langkah mitigasi dan juga adaptasi yang berkelanjutan di seluruh wilayah. Mereka berpendapat bahwa berbagai aspek pelayanan pemerintah daerah perlu diintegrasikan, seperti infrastruktur, perencanaan dan pembangunan kota, sosial ekonomi, kesehatan masyarakat, dan penegakan regulasi. Kebijakan pengelolaan sampah diperkuat melalui kelompok kerja, masyarakat, dan juga otoritas daerah. Zheng, S menjelaskan dalam tulisannya bahwa Kota merupakan organisme dinamis dari aktivitas sosial manusia, dan proses metabolisme organisme besar ini adalah pembaruan perkotaan. Di satu sisi, pembaruan perkotaan adalah transformasi, pemindahan, pemeliharaan, dan pembangunan kembali infrastruktur perkotaan dan perangkat keras lainnya; di sisi lain, itu adalah transformasi lingkungan ekologi perkotaan, kelanjutan dan penafsiran ulang konteks sejarah. Feldmeyer, D Nowak, W Jamshed, A Birkmann, berbicara mengenai Ketahanan iklim suatu negara sangat penting untuk masa depan yang berkelanjutan. Cara negara menanggapi perubahan iklim perlu beradaptasi dari pendekatan manajemen bencana yang reaktif dan terfokus ke belakang, menjadi lebih proaktif dan mengantisipasi apa yang akan datang. Suleiman, L mengatakan mengenai perlunya transformasi dari sistem drainase air hujan konvensional menuju sistem Infrastruktur Hijau Biru, yang dirancang sebagai sistem spasial terbuka untuk pengelolaan air hujan yang berkelanjutan. Namun, sistem ini dipandang sebagai sistem sosioteknik dan, akibatnya, transisi ini menjadi lambat. Makalah ini berfokus pada proses perencanaan di balik proyek Infrastruktur Hijau Biru di Stockholm dan menganalisisnya sebagai eksperimen transisi

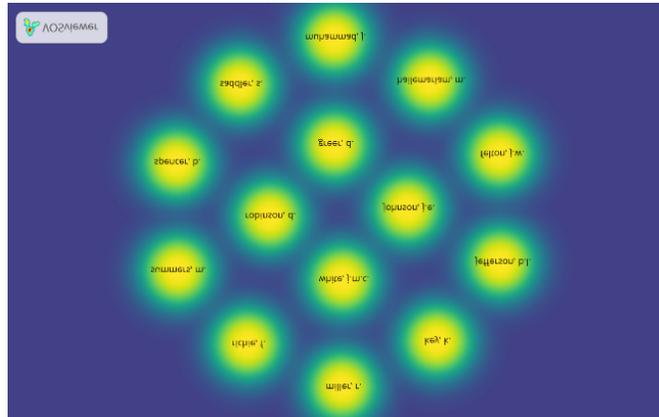
Xu, H Yan dalam jurnalnya membahas mengenai percepatan urbanisasi dan perkembangan urban rail transit (URT) di China, semakin banyak kota metropolitan yang mulai menerapkan teori transit oriented development (TOD) dalam perencanaan URT.

Tetapi ia menemukan permasalahan dalam ketidaksesuaian spasial antara tempat tinggal dan pekerjaan, pemanfaatan infrastruktur lalu lintas yang tidak seimbang, dan pencemaran lingkungan tetap ada. Selain itu, studi teori TOD skala regional masih kurang di Cina. Lalu Sultan, B Katar, I M Al-Atroush menulis tentang Jaringan transportasi umum baru yang sedang dibangun di kota Riyadh. Bus umum dan metro Riyadh ini diharapkan segera tersedia untuk penumpang. Berdasarkan Visi Saudi 2030, pemerintah mengarahkan miliaran dolar untuk merehabilitasi infrastruktur dan trotoar guna mendukung transformasi nasional menuju mobilitas berkelanjutan. Dengan pemikiran tersebut, pemahaman tentang pilihan moda mobilitas individu diperlukan untuk mengadopsi perencanaan yang tepat dan kebijakan manajemen. Hamim, O F Aninda, S S Hoque, M S Hadiuzzaman, M Menjelaskan bahwa Infrastruktur jalan memainkan peran penting dalam memperkaya perekonomian negara berkembang. Keberlanjutan infrastruktur transportasi membantu proses pembangunan ini, oleh karena itu otoritas jalan berupaya membangun jalan dengan masa pakai yang lebih lama



Gambar 6. Overlay Visualization

Pada gambar 6 tersebut adalah gambar dari data overlay visualization digunakan untuk melihat evolusi riset yang dimana data tersebut menunjukkan tahun terbitan artikel. Semakin ke kiri dari garis warna yang ditunjukkan pada gambar 2 maka menunjukkan tahun terbitnya semakin lama begitu juga sebaliknya semakin ke kanan maka tahun terbitnya semakin terbaru. Namun karena dokumen yang dipublikasikan dan juga penulis yang mempublikasikan tulisannya menggunakan tahun terbit yang sama yakni ditahun 2020. Maka warna yang dihasilkanpun hanya terdapat satu warna saja. Dengan demikian berarti pada gambar 6 yang membahas mengenai penulis/author dalam tema-tema atau konsep penelitian yang muncul pada gambar diterbitkan di tahun yang sama. Sehingga tidak terdapat perbedaan warna pada overlay visualizationnya.



Gambar 7. Density Visualization

Berdasarkan gambar di atas, warna yang paling terang menunjukkan penulis dengan hasil publikasi terbanyak. Begitupula sebaliknya, penulis dengan warna paling pudar, maka penulis tersebut masih sedikit mempublikasikan karyanya. Jika diurutkan berdasarkan gambar di atas, maka susunan penulis dari penulis dengan hasil terbanyak hingga tersedikit, adalah sebagai berikut; Miller, R. Key, K. Jefferson, b.l. Felton, j.w. Hailermariam, m. Muhammad, j. Saddler, s. Summers, m. Richie, f. White, j.m.c. Johnson, j.e. Geer, d. Robinson, d.

Kesimpulan

Partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pembangunan masih sangat rendah atau kurang maksimal, terutama dalam tahap pelaksanaan pembangunan. Hal ini dapat ditinjau dengan sebagian masyarakat memberikan jawaban rendah terhadap setiap pertanyaan-pertanyaan atau indikator-indikator yang penulis ajukan. Masih kurang aktifnya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan adalah disebabkan karena masih kurang pemahannya masyarakat akan pentingnya partisipasi mereka dalam mendukung program pembangunan tersebut. Sedangkan aspek-aspek yang berhubungan dengan partisipasi yang ditinjau dari, pekerjaan serta penghasilan/pendapatan berhubungan erat dengan partisipasi pada tahap pelaksanaan pembangunan sedangkan pendidikan berhubungan dengan partisipasi pada tahap perencanaan serta monitoring dan evaluasi.

Yaitu Perencanaan pembangunan infrastruktur berkelanjutan adalah merupakan pembangunan yang harus dapat memenuhi kebutuhan sekarang dan akan terus berkembang sampai di masa depan tanpa harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang. Dalam proses pembangunan ifrastrktur yang berkelanjutan ini tentu perlu di adakannya optimalisasi manfaat baik dari sumber daya alam, sumber daya manusia, dan juga ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menciptakan dan menghubungkan ketiga aspek tersebut maka akan menimbulkan keselarasan pada pengimplementasiannya nanti dan mencapai target sesuai dengan yang di diharapkan sejak tahap perencanaan di awal. Pembangunan yang berkelanjutan ini lebih dikenal dengan

Sustainable Development atau pembangunan yang berkelanjutan, memiliki arti sebagai pembangunan yang memiliki orientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia melalui pemanfaatan sumber daya alam dengan bijaksana, efektif, efisien, dan memperhatikan pemanfaatannya baik untuk generasi saat ini maupun generasi yang akan datang nantinya. Pembangunan yang berkelanjutan harus dapat mencerminkan tindakan yang mampu menjaga kelestarian lingkungan alamnya. Dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dapat dicirikan sebagai berikut. Pertama, Memberikan kemungkinan pada kelangsungan hidup dengan terus melakukan pelestarian fungsi dan kemampuan ekosistem yang mendukungnya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Kedua, Memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan mengkolaborasikannya terhadap teknologi terkini yang tidak memiliki dampak merusak lingkungan sekitar yang ada. Ketiga, Memberikan kesempatan terhadap sektor dan bidang lainnya untuk dapat terus berkembang secara bersama-sama dan berintegrasi baik ditingkat pusat maupun daerah juga dalam kurun waktu yang sama maupun kurun waktu yang berbeda satu sama lainnya secara berkelanjutan. Keempat, Meningkatkan serta terus dapat melestarikan kemampuan dan fungsi dari ekosistem itu sendiri untuk dapat memberdayakan, melindungi, serta mendukung sumber daya alam bagi seluruh kehidupan yang ada secara berkelanjutan. Kelima, Memakai prosedur dan tata cara yang memiliki perhatian terhadap kelestarian fungsi dan kemampuan ekosistem untuk mendukung kehidupan, baik pada masa saat ini maupun masa yang akan datang di kemudian hari.

Tentu dalam penelitian ini ada keterbatasan yang dialami, yaitu dalam penelitian ini adalah kurangnya sumber jurnal yang memiliki kesesuaian atau relevansi dengan judul yang diangkat sehingga perlu terus adanya penemuan hal-hal baru untuk dapat mengungkapkan permasalahan dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, selain itu keterbatasan yang lain adalah di aspek perbedaan negara yang memiliki pandangan dan juga budaya tersendiri terhadap partisipasi masyarakat berbasis pembangunan infrastruktur dengan yang ada di Indonesia beserta keanekaragaman juga sistem yang ada di dalam pemerintah itu sendiri maupun yang ada di masyarakatnya sehingga dalam proses pembangunan infrastruktur perlu mengakomodasi seluruh kepentingan yang ada dan juga tidak mengganggu kelestarian ekologi dan kehidupan masyarakat sekitar baik dalam segala aspek. Selain itu proses perencanaan pembangunan berkelanjutan juga masih kurang massif karena tingkat sosialisasinya yang masih belum efektif dan efisien dan juga dalam pengimplementasiannya, itu semua dikarenakan masih banyak negara yang memiliki aturannya sendiri yang berbeda di setiap negara yang ada di dunia ini, dan juga terdapat perbedaan mengenai pelaksanaan partisipasi masyarakat berbasis pembangunan infrastruktur

Dengan melihat pada pembangunan yang tujuannya untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kemudian ketika realitas dihadapkan dengan adanya fakta bahwasanya terdapat anak-anak dalam tanda kutip anak pinggiran, yang

nyatanya masih banyak yang tidak bersekolah, kesenjangan ekonomi antara si kota dan si desa, menjadi salah satu penyebab gagalnya arah pembangunan yang dilakukan pemerintah. Pemerintah harus lebih peka terhadap permasalahan-permasalahan

yang sedang terjadi di tengah masyarakat yang sampai kini masih membutuhkan pembangunan, baik secara infrastruktur, kualitas sdm, dukungan pemerintah pada sector pertanian, dan umkm. Inilah mengapa menjadi penting ketika arah pembangunan pada kawasan pedesaan harus melihat juga dari sisi keunggulan yang dimiliki oleh suatu desa. Ketika keunggulan yang dimiliki oleh suatu desa, kemudian didorong oleh pemerintah untuk segera dimasifkan, maka tentunya akan berdampak kepada kualitas kesejahteraan masyarakatnya. Masyarakat yang sejahtera salah satunya ditandai dengan minimnya tingkat kemiskinan, dan juga tingkat kesenjangan anatara sikaya dan simiskin tidak begitu besar. Dengan demikian maka dapat diambil titik simpul bahwasanya arah pembangunan pada seluruh kawasan yang sangat diperlukan untuk mengilustrasikan pelaksanaan pembangunan agar pembangunan tersebut tersusun, terkonsep dan lebih terarah, sehingga output yang dihasilkan dapat tepat sasaran. Kemudian disana pemerintah juga perlu melakukan pengkajian terhadap permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi pada suatu desa, namun disisi lain pemerintah juga perlu mengidentifikasi keunggulan yang dimiliki oleh suatu desa. Hal tersebut digunakan sebagai guideline pemerintah dalam menjalankan program pembangunan.

Kepada para peneliti yang akan mengakat topik ini kedepannya harus terus dapat melakukan pemetaan awal terlebih dahulu karena demi menentukan topik pembahasan khususnya yang masih belum banyak di teliti agar cakrawala ilmu di bidang ini akan terus berkembang seiring berjalannya waktu, lalu dalam menentukan topik-topik yang berkaitan dengan judul haruslah sangat selektif agar nantinya dapat mengurangi kesalahan dan ketidak pahaman mengenai judul yang akan diangkat, dengan melakukan penggalian dan penelitian secara mendasar terhadap hal-hal baru pada tiap jurnal yang memiliki hubungan dan relevansi dengan judul maka akan terus dapat mengasah pemahaman serta pokok pikiran yang akan di tulis di kemudian hari dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan jaman sebagai pendapat ilmiah, penguat argumentasi, juga pembuka cakrawala ilmu dalam penulisan artikel mengenai judul terkait. Di harapkan juga nantinya ada kesesuaian antara topik dan judul sehingga harus sangat diperhatikan dalam melakukan sebuah review artikel agar nantinya dapat menambahkan pemahaman dari yang dibaca.

Daftar Pustaka

- Olugbamila, O. B., Adeyinka, S. A., Odunsi, O. M., Olowoyo, S. A., Isola, O. L., & Adanlawo, T. D. (2020). Community participation in the provision of environmental sanitation infrastructure in Akure, Nigeria. *Environmental and Socio-Economic Studies*, 8(3), 48–59. <https://doi.org/10.2478/environ-2020-0017>
- Tuan Hai, D. (2020). Communities' physical contributions for developing rural transport infrastructure in Dong Nai province, Vietnam. *Open Transportation Journal*, 14, 14–21. <https://doi.org/10.2174/1874447802014010014>
- Reisdorf, B. C., Fernandez, L., Hampton, K. N., Shin, I., & Dutton, W. H. (2020). Mobile Phones Will Not Eliminate Digital and Social Divides: How Variation in Internet Activities Mediates the Relationship Between Type of Internet Access and Local Social Capital in Detroit. *Social Science Computer Review*. <https://doi.org/10.1177/0894439320909446>
- Bell, D., & Orozco, L. (2021). Neighbourhood arts spaces in place: cultural infrastructure and participation on the outskirts of the creative city. *International Journal of Cultural Policy*, 27(1), 87–101. <https://doi.org/10.1080/10286632.2019.1709059>
- Xuan Tran, B., Thi Nguyen, H., Quang Pham, H., Thi Le, H., Thu Vu, G., Latkin, C. A., Ho, C. S. H., & Ho, R. C. M. (2020). Capacity of local authority and community on epidemic response in Vietnam: Implication for COVID-19 preparedness. *Safety Science*, 130. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2020.104867>
- Schichel, M. C. P., Veenstra, M. Y., Kempen, G. I. J. M., de Vugt, M. E., van der Zanden, B. A. M., & Verhey, F. R. J. (2020). Senior Friendly Communities: Designing an approach for cross-border exchange of public health policy. *Health Policy*, 124(10), 1129–1136. <https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2020.05.020>
- Mononen, N., Pohjanoksa-Mäntylä, M., Airaksinen, M. S., & Hämeen-Anttila, K. (2020). How far are we from a medication use process aiming at well-informed adherent patients with long-term medications in Finland? Qualitative study. *BMJ Open*, 10(6), e036526. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2019-036526>
- Matzopoulos, R., Bloch, K., Lloyd, S., Berens, C., Bowman, B., Myers, J., & Thompson, M. L. (2020). Urban upgrading and levels of interpersonal violence in Cape Town, South Africa: The violence prevention through urban upgrading programme. *Social Science and Medicine*, 255. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2020.112978>
- Surya, B., Syafri, S., Hadijah, H., Baharuddin, B., Fitriyah, A. T., & Sakti, H. H. (2020). Management of slum-based urban farming and economic empowerment of the community of Makassar City, South Sulawesi, Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, 12(18). <https://doi.org/10.3390/SU12187324>
- Eisenberg, Y., Heider, A., Gould, R., & Jones, R. (2020). Are communities in the United States planning for pedestrians with disabilities? Findings from a systematic evaluation of local government barrier removal plans. *Cities*, 102. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2020.102720>
- Perry, E. S., Smith, S. N., & Mulvaney, K. K. (2020). Designing solutions for clean water on Cape Cod: Engaging communities to improve decision making. *Ocean and Coastal Management*, 183. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2019.104998>
- Jelks, N. O., Smith-Perry, D. J., Fuller, C. H., & Stauber, C. (2020). Participatory research in Northwest Atlanta's Proctor Creek Watershed: Using photovoice to explore environmental health risks at the water's edge. *Health and Place*, 66. <https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2020.102444>

- Agarwal, S., Glenton, C., Henschke, N., Tamrat, T., Bergman, H., Fønhus, M. S., Mehl, G. L., & Lewin, S. (2020). Tracking health commodity inventory and notifying stock levels via mobile devices: a mixed methods systematic review. *The Cochrane Database of Systematic Reviews*, 10, CD012907. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD012907.pub2>
- Vega Ocasio, D., Pérez Ramos, J. G., & Dye, T. D. V. (2020). Conducting an immersive community-based assessment of post-hurricane experience among Puerto Ricans: lived experience of medical ecology in an environmental disaster and migration. *BMC Public Health*, 20(1). <https://doi.org/10.1186/s12889-020-09735-w>
- Jokhu, P. D., & Kutay, C. (2020). Observations on appropriate technology application in indigenous community using system dynamics modelling. *Sustainability (Switzerland)*, 12(6). <https://doi.org/10.3390/su12062245>
- Li, Z., Yu, Y., Wang, T., Yin, G., Li, S., & Wang, H. (2021). Are You Still Working on This An Empirical Study on Pull Request Abandonment. *IEEE Transactions on Software Engineering*. <https://doi.org/10.1109/TSE.2021.3053403>
- Kokai, A., Blake, A., Dedeo, M., & Lent, T. (2020). Building shared information infrastructure for chemical alternatives assessment. *Elementa*, 8(23). <https://doi.org/10.1525/elementa.422>
- Glowacki, E. M., Zhu, Y., Bernhardt, J. M., & Magsamen-Conrad, K. (2021). Technological capital within aging United States-based populations: challenges and recommendations for online intervention uptake. *Journal of Applied Communication Research*. <https://doi.org/10.1080/00909882.2021.1885051>
- Wong, M., Wilkie, A., Garzón-Galvis, C., King, G., Olmedo, L., Bejarano, E., Lugo, H., Meltzer, D., Madrigal, D., Claustro, M., & English, P. (2020). Community-engaged air monitoring to build resilience near the US-Mexico border. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(3). <https://doi.org/10.3390/ijerph17031092>
- Riaz, B. K., Ali, L., Ahmad, S. A., Islam, M. Z., Ahmed, K. R., & Hossain, S. (2020). Community clinics in Bangladesh: A unique example of public-private partnership. *Heliyon*, 6(5). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e03950>
- Tennakoon, V., Wiles, J., Peiris-John, R., Wickremasinghe, R., Kool, B., & Ameratunga, S. (2020). Transport equity in Sri Lanka: Experiences linked to disability and older age. *Journal of Transport and Health*, 18. <https://doi.org/10.1016/j.jth.2020.100913>
- Carroll, J. M., Beck, J., Boyer, E. W., Dhanorkar, S., & Gupta, S. (2020). Empowering community water data stakeholders. *Interacting with Computers*, 31(5), 492–506. <https://doi.org/10.1093/iwcomp/iwz032>
- Doumouchsis, S. K., Rada, M. P., Rada, M. P., Rada, M. P., Pergialiotis, V., Pergialiotis, V., Falconi, G., Falconi, G., Haddad, J. M., Haddad, J. M., Betschart, C., & Betschart, C. (2020). A protocol for developing, disseminating, and implementing a core outcome set (COS) for childbirth pelvic floor trauma research. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 20(1). <https://doi.org/10.1186/s12884-020-03070-z>